DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abu Achmadi, Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2003.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Laporan Akhir Evaluasi Kebijakan Perencanaan Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Strategis,* Jakarta, Bappenas, 2010.

Budi Winarno, *Kebijakan Publik : Teori dan Proses Edisi Revisi,* Media Presindo, Yogyakarta, 2007.

Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung, PT. Alumin, 2001.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2002.

Hamid Darmadi, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung, Alfabeta, 2011.

Hari Sabarno, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Jakarta, Sinar Grafika, 200

Harun Husein, *Lingkungan Hidup : Masalah Pengelolaan dan Pengakan Hukumnya*, Jakarta, PT. Bumi Aksara, 1993.

Johnny Ibrahum, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,* Surabaya, Bayumedia Publishing, 2006.

Kartasasmita, G. *Administrasi Pembangunan (Perkembangan Pemikiran Dan Prakteknya Di Indonesia)*, Jakarta, LP3ES, 1997.

Koentaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat,* Jakarta, Gramedia, 1977.

Moh. Nazir, *Metode Penelitian,* Jakarta, Ghalia Indonesia, 1985.

M Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara Cetakan kesebelas*, Jakarta, Bumi Aksara, 2002.

Otto Soemarwoto, *Ekologi Lingkungan Hidup*, Jakarta, Djembatan, 2001.

Setya Retnami. *Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta, Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2001.

Soerjono Soekanto dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta, Rineka Cipta, 2000.

Syafii, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2011.

Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia,* Jakarta, Rajawali Pers, 2012.

Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Jakarta, Kencana, 2016.

Jurnal

Amelia, S., Rustiadi, E., Barus, B., & Juanda, B, Analisis Spasial Karakteristik Kawasan Strategis Ekonomi Koridor Barat-Timur dalam Pengembangan Wilayah Provinsi Sumatera Barat, *TATALOKA 24(2)*, 2022.

Amin, Rizal Irvan, Omnibus Law Antara Desiderata dan Realita, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan 15(2)*, 2020.

Arsawan, I. Gede Yudi, and I. Gede Yusa, Dampak Perubahan Pengaturan Penataan Ruang Pasca Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, *Amsir Law Journal 5.1* : 13-22, 2023.

Arya Sosman, Kajian Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Tata Ruang Kota Mataram*, Jurnal IUS Vol. II No. 5*, 2014.

Buhar Hamja, et.all, Fungsi Kewenangan Daerah Dalam Perencanaan Tata Ruang Di Daerah Perbatasan Kabupaten/Kota, *Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol.1 No.2*, 2021.

Dian Kus, Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Implikasinya Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang, *Universitas Islam Indonesia*, 2020, diakses melalui https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/41395

Firman T, Studi Penataan Ruang Kawasan-Kawasan Strategis, J*urnal Perencanaan Wilayah dan Kota 3.3*, 2011.

Hayati, Kewenangan Pengelolaan Tata Ruang Berbasis Lingkungan Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, *Jurnal Wazaka Hukum*, 2022.

Hidayah, Michael, Konsepsi Negara Kesatuan Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan 4*, 2020.

Kusumaedi, P. R. T. E., & Bagiastra, I. N., Urgensi Keberadaan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Terhadap Lingkungan Hidup di Daerah Perkotaan, *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 2016.

Masayu NT, Implikasi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Melaksanakan Penataan Ruang Nasional dan Penyelenggaraan Penataan Ruang*, Jurnal Jatiswara 29;36(3):238-49*, 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031

Website

Ady Thea, Penataan Ruang dalam UU Cipta Kerja Dinilai Sentralistik dan Minim Partisipasi, diakses pada tanggal 26 Maret 2024 melalui https://www.hukumonline.com/berita/a/penataan-ruang-dalam-uu-cipta-kerja-dinilai-sentralistik-dan-minim-partisipasi-lt6074141044f60/#!

Bahan Paparan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengenai Sosialisasi Kebijakan Penataan Ruang PP Nomor 21 Tahun 2021, diakses pada tanggal 5 Desember melalui https://tataruang.atrbpn.go.id/Images/Uploads/New/Dokumen/2021/Maret/Pengumuman/Bahan%20Paparan%20Pak%20Dirjen%20Tata%20Ruang%20Sosialisasi%20PP%2021%202021.pdf

Firli A., Inilah Rencana Ditjen Tata Ruang, Dukung Kebijakan Satu Data Indonesia, 2022, diakses pada tanggal 2 Februari 2024 melalui https://www.komite.id/2022/08/08/inilah-rencana-ditjen-tata-ruang-dukung-kebijakan-satu-data-indonesia/

KPUPR, Kawasan Strategis Nasional Harus Diamankan Dalam RTR Daerah, diakses pada tanggal 2 Februari 2024 melalui https://pu.go.id/berita/ksn-harus-diamankan-dalam-rtr-daerah

Pemerintah Daerah Kota Semarang, Penandatanganan Kesepakatan Bersama Kabupaten/Kota Se-Wilayah Kedungsepur, diakses pada tanggal 2 Februari 2024 melalui https://kerjasamaotda.semarangkota.go.id/berita/penandatanganan-kesepakatan-bersama-kedungsepur